Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta (tahun 2012-2016)

SKRIPSI

Oleh:

Nama : Rohman Anugrah Sulistyo

Nomor Mahasiswa : 16313096

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2017

Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta (tahun 2012-2016)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna
memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1
jurusan Ilmu Ekonomi,
pada Fakultas Ekonomi,
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama	: Rohman Anugrah Sulistyo
Nomor Mahasiswa	: 16313096
Jurusan	: Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, Februari 2018

Penulis,



Rohman Anugrah Sulistyo

PENGESAHAN

Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

(Tahun 2012-2016)

Nama	: Rohman Anugrah Sulistyo
Nomor Mahasiswa	: 16313096
Jurusan	: Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, Februari 2018
telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,

Abdul Hakim, SE, M.Ec, Ph.D

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS KETIMPANGAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN DI PROVINSI YOGYAKARTA TAHUN 2012-2016

Disusun Oleh : **ROHMAN ANUGRAH SULISTYO**

Nomor Mahasiswa : **16313096**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS

Pada hari Senin, tanggal: 5 Februari 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D. .....

Penguji : Rokhedi Priyo Santoso, SE., MIDEc .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala Puji bagi Allah SWT atas segala nikmat, kesehatan, dan karunia yang telah diberikan kepadaku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Saya ingin persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua dan seluruh keluarga saya yang telah memberi dukungan penuh baik Doa maupun materiin sehingga saya dapat menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia dengan baik.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta Tahun 2012-2016". Selesainya skripsi ini tidak lepas dari pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang sangat berarti. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. D. Agus Harjito, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Abdul Hakim, SE, M.Ec, Ph.D, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen, pengajar, dan staf akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Kedua orangtuaku Bapak Suyudi, S.Pd dan Ibu Ismiati atas segala doa dan motivasinya.
5. Adik tercinta Tea Maulida Rahayu, semoga mendapatkan Universitas (Negeri) terbaik dan bisa lebih mandiri lagi.
6. Rossa Yulianasari yang selalu memberi dukungan baik semangat maupun doa.
7. Rekan seperjuangan Pasukan 16 Bismillah SE (Rima, Beny, Isma, Verandy, Aji, Bintang,Didi , Icha, Zulfa, Eros, Taufik, Dika, Dea, dan Vicky). Kalian terbaik dan sukse untuk kita semua, *good luck for us.*
8. Mas Zulkarnaen Mardiansyah S.E yang telah menjadi inspirator.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala doa dan dukungannya dapat menjadi amal sholeh yang senantiasa di ridhoi Allah SWT. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis tetapi juga untuk masyarakat luas.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Februari 2018

Rohman Anugrah Sulistyo

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme ii

Halaman Pengesahan Skripsi iii

Halaman Pengesahan Ujian iv

Halaman Persembahan v

Halaman Kata Pengantar vi

Halaman Daftar Isi viii

Halaman Daftar Tabel x

Halaman Daftar Gambar xi

Halaman Lampiran xii

Halaman Abstrak xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 8

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 12

2.1 Kajian Pustaka 12

2.2 Kerangka Pemikiran 26

2.3 Hipotesis 29

2.4 Landasan Teori 30

2.4.1 Definisi Kesenjangan 30

2.4.2 Ketimpangan Ekonomi 30

2.4.3 Konsep Ketimpangan Antar Daerah 31

2.4.4 Faktor-faktor Ketimpangan Ekonomi 33

2.4.5 Teori-teori Kesenjangan Ekonomi 36

2.4.6 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 39

2.4.7 Definisi Pembangunan Ekonomi Daerah 41

2.4.8 Indeks Pembangunan Manusia 42
2.4.9 Pendapatan Asli Daerah.....43
2.4.10 Sumber Pendapatan Asli Daerah 43
2.4.11 Upah minimum Kabupaten 46
2.4.12 Indeks Enthropy Theil 47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 49
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 49
3.1.1 Variabel Penelitian 49
3.1.2 Definisi Operasional 49
3.2 Data dan Sumber Data 51
3.2.1 Data 51
3.2.2 Sumber Data 51
3.3 Metode Analisis Data 52
3.3.1 Model Regresi Data Panel 53
3.3.2 Metode Estimasi Data Panel 53
3.3.3 Pemilihan Model Regresi Panel 55
3.4 Uji Statistik 56
BAB IV HASIL DAN ANALISIS 60
4.1 Deskriptif Data Penelitian 60
4.2 Indeks Entrophy Theil 60
4.3 Regresi Data Panel 62
4.3.1 Estimasi *Pooled Least Square* 63
4.3.2 Estimasi *Fixed Effect Model* 64
4.3.3 Estimasi *Random Effect Model* 65
4.4 Pemilihan Model 66
4.4.1 *Likelihood Ratio Test (Chow Test)* 66
4.4.2 *Hausman Test* 68
4.5 Analisis Hasil Regresi 69
4.5.1 Koefisien Determinasi (R^2) 71
4.5.2 Uji F 71
4.5.3 Uji T 72
4.6 Pengujian Hipotesis 74
4.7 Intrepetasi Hasil Akhir 76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 82
5.1 Kesimpulan 82
5.2 Saran 83
Daftar Pustaka 84

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Data IPM Tahun 2012-2016 4
1.2 Data PAD Tahun 2012-2016.....5
1.3 Data UMK Tahun 2012-2016 6
1.4 Data JP Tahun 2012-2016.....7
4.1 Indeks Entrophy Theil tahun 2012-2016 61
4.2 Data Jumlah Penduduk tahun 2012-2016…..... … 62
4.3 Estimasi Output Hail Regresi PLS 63
4.4 Estimasi Output Hail Regresi *Fixed Effect Model* 64
4.5 Estimasi Output Hail Regresi *Random Effect Model* 65
4.6 Hasil *Likelihood Ratio Test* 67
4.7 Hasil Pengujian *Hausman Test* 68
4.8 Estimasi Output Hasil Regresi *Random Effect Model* 70
4.9 Data IPM tahun 2012-2016..... 77
4.10 Data PAD tahun 2012-2016..... 78
4.11 Data UMK tahun 2012-2016..... 79
4.12 Data Jumlah Penduduk tahun 2012-2016 80

DAFTAR GAMBAR

2.2 Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran halaman

I. Data Skripsi 90

ABSTRAK

Di dalam pembangunan Indonesia masih memiliki berbagai masalah yang dihadapi. Salah satu masalah kompleks yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah ketimpangan ekonomi antar wilayah. Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh IPM, PAD, UMK, dan Jumlah Penduduk terhadap ketimpangan Ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data panel dengan data runtut waktu *(time series)* selama 5 tahun dari tahun 2012-2016 dan *cross section* sebanyak 5 Kabupaten di Provinsi Yogyakarta yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Data panel dilakukan melalui pendekatan *Random Effect Model* melalui Uji Chow, Uji Hausman, koefisien determinasi,uji R, uji f, dan uji t.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan ekonomi, variabel PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan ekonomi, variabel UMK berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan ekonomi, variabel JP berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ketimpangan ekonomi dan hasil pengujian dengan menggunakan model regresi *Random Effect Model* menunjukkan bahwa semua regressor (variabel independen) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah untuk menurunkan tingkat ketimpangan antar kabupaten.

Kata Kunci : Ketimpangan Ekonomi, *indeks theil*, IPM (indeks pembangunan manusia), PAD (pendapatan asli daerah), UMK (upah minium kabupaten), JP (jumlah penduduk)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses perubahan secara terus-menerus dalam jangka panjang yang tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang menjadi indikator moneter, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, melek huruf, kesejahteraan dan kemakmuran (Arsyad, 2010). Negara Indonesia adalah negara yang luas terdiri dari 5 pulau besar, yaitu : Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya dan rangkaian pulau-pulau ini disebut pula sebagai kepulauan Nusantara atau kepulauan Indonesia. Di dalam pembangunan Indonesia masih memiliki berbagai masalah yang dihadapi. Salah satu masalah kompleks yang dihadapi oleh Indonesia adalah ketimpangan ekonomi antar wilayah.

Dampak dari terjadinya ketimpangan ekonomi dapat berupa dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan ekonomi yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga akan tercapai kesejahteraannya. Dampak negatif dari ketimpangan ekonomi antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi akan sering dipandang tidak adil (Todaro, 2004).

Dampak negatif ketimpangan inilah yang akan menjadi masalah pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Noegroho dan Soelistianingsih (2007), mengatakan bahwa ketimpangan juga sering terjadi secara nyata di wilayah provinsi itu sendiri. Kesenjangan antar daerah terjadi sebagai konsekuensi dari pembangunan yang terkonsentrasi pada satu titik. Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani kesenjangan baik ketimpangan distribusi pendapatan maupun kesenjangan wilayah belum banyak membawa hasil yang signifikan. Bahkan yang sering terjadi adalah kebijakan pembangunan yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi justru dapat menambah kesenjangan baik terhadap distribusi pendapatan maupun kesenjangan wilayah.

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan atau bidang usaha semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Tujuan dilakukannya pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk antar daerah dan antar sektor.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal. Modal yang ditanamkan dalam suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan produktifitas yang dapat menyebabkan peningkatan PDRB (Produk Domesti Regional Bruto). Dengan meningkatnya PDRB maka secara langsung pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan pemerataan akan menimbulkan ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah tersebut dapat terlihat dengan adanya wilayah yang maju dangan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita merupakan masalah yang berbeda dari masalah distribusi pendapatan. Apabila terjadi distribusi pendapatan yang sempurna maka tiap orang akan menerima pendapatan yang sama besarnya. Angka pendapatan per kapita yang ada selama ini merupakan angka rata-rata yang tidak mencerminkan pendapatan yang diterima oleh tiap-tiap penduduk. Seberapa yang diterima oleh tiap penduduk sebenarnya sangat berkaitan dengan masalah merata atau tidak meratanya distribusi pendapatan tersebut. Oleh karenanya pemerataan pendapatan adalah masalah yang penting dalam pembangunan.

Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah akan menyebabkan pengaruh negatif terhadap daerah yang memiliki modal sedikit, sumber daya alam yang belum dikelola dengan baik dan infrastruktur yang terbatas. Hal ini hanya berdampak positif terhadap daerah yang memiliki modal dan infrastruktur yang memadai. sehingga berakibat meningkatnya

ketimpangan antar daerah (Todaro, 2000). Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang tinggi juga harus mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran.

Berikut adalah data keadaan pembangunan ekonomi di Provinsi Yogyakarta:

Tabel 1.1

Data IPM Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

tahun 2012-2016 (persen)

Kabupaten	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
YOGYAKARTA	76.15	76.44	76.81	77.59	77.89
SLEMAN	80.10	80.26	80.73	81.20	81.56
BANTUL	76.13	76.78	77.11	77.99	78.30
KULON PROGO	69.74	70.14	70.68	71.52	71.78
GUNUNG KIDUL	65.69	66.31	67.03	67.41	68.20

Sumber: BPS 2016

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki IPM tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lain. Tahun 2016 IPM Kabupaten Sleman sebesar 81,56% menjadi yang tertinggi sedangkan IPM Gunung Kidul tahun 2016 sebesar 68,20% dan menjadi yang terendah dibandingkan kabupaten lainnya. Menurut data tabel 1.1 terjadi perbedaan tingkat IPM yang tinggi antara Kabupaten Sleman dengan daerah lainnya, ini mengindikasikan ada ketimpangan yang terjadi di

Provinsi Yogyakarta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak.

Tabel 1.2

Data PAD Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

tahun 2012-2016 (ribu rupiah)

Kabupaten	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
YOGYAKARTA	241,190,745	304,797,499	404,272,608	449,849,108	507,875,473
SLEMAN	220,367,231	298,406,947	383,497,912	577,585,009	624,758,777
BANTUL	121,593,862	170,006,171	265,128,265	312,419,914	380,475,674
KULON PROGO	54,293,141	64,750,332	92,815,160	187,802,917	213,965,972
GUNUNG KIDUL	55,600,362	66,710,860	90,333,149	145,856,403	232,475,879

Sumber : BPS 2016

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri. PAD sendiri digunakan sebagai sumber APBD yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan diharapkan mampu untuk

mengurangi tingkat ketimpangan. Menurut data tabel 1.2 terjadi peningkatan PAD yang besar dari tahun 2015 ke tahun 2016. Ini merupakan pertanda yang positif karena dengan meningkatnya jumlah PAD maka pertumbuhn ekonomi juga akan ikut naik seiring dengan naiknya PAD. Kabupaten Sleman memiliki PAD paling besar pada tahun 2016 yakni sebesar 624,758,777 ribu rupiah dan Kabupaten Kulon Progo memiliki PAD terendah yaitu 213,965,972 ribu rupiah. 2 dari 5 Kabupaten memiliki PAD yang bisa dibilang terlalu mencolok yaitu kabupaten Sleman dan Kota Yogya dibandingkan 3 kabupaten lainnya yaitu Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul.

Tabel 1.3

Data UMK per Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

tahun 2012-2016

Kabupaten	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
YOGYAKARTA	892.660	1.065.247	1.173.300	1.302.500	1.452.400
SLEMAN	850.340	1.026.181	1.127.000	1.200.000	1.338.000
BANTUL	754.450	993.484	1.125.500	1.163.800	1.297.700
KULON PROGO	710.567	954.339	1.069.000	1.138.000	1.268.870
GUNUNG KIDUL	650.450	947.114	988.500	1.108.249	1.237.700

Sumber: DPPKA kab DIY

Pendapatan dari upah merupakan penghasilan bagi pekerja yang merupakan pendapatan terbesar dari rumah tangga dan memiliki kontribusi utama pendapatan rumah tangga. Semakin tinggi upah yang di terima maka kesejahteraan rumah tangga juga akan meningkat. Jika melihat tabel 1.3

UMK di Provinsi Yogyakarta dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan UMK diharapkan mampu menurunkan tingkat ketimpangan anntar daerah. UMK tertinggi masih dipegang oleh Kota Yogya yaitu sebesar 1.452.400 juta rupiah dan jarak antar keempat kabupaten tidak terlalu timpang artinya ketimpangan antar kabupaten pada sektor UMK tidak terlalu mencolok.

Tabel 1.4

Data Jumlah Penduduk per Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

tahun 2012-2016

Kabupaten	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
YOGYAKARTA	397,594	402,679	407,667	412,704	417,805
SLEMAN	1,128,943	1,141,733	1,154,501	1,167,481	1,182,561
BANTUL	934,674	947,072	959,445	972,511	983,672
KULON PROGO	398,672	403,179	407,709	412,198	415,201
GUNUNG KIDUL	692,579	700,191	707,794	715,282	721,435

Sumber: BPS 2016

Jumlah Penduduk merupakan besarnya populasi di setiap daerah. Menurut teori klasik semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin banyak tenaga kerja yang dapat dikerjakan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Semakin tinggi jumlah penduduk diharapkan mampu membangun kesejahteraan daerahnya. Menurut data jumlah penduduk kabupaten di Provinsi Yogyakarta pada tabel 1.4, Kabupaten Sleman memiliki jumlah

penduduk tertinggi dari tahun ketahun dan bisa dikatakan mencolok dibandingkan kabupaten lainnya. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Sleman sebesar 1.182.561, Kabupaten Bantul sebesar 983.672, Kabupaten Gunung Kidul sebesar 721.425, Kota Jogja sebesar 417.805 dan jumlah penduduk terendah dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo yaitu sebesar 415.201.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul **"Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta Tahun 2012-2016".**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadapketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta.
2. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta.
3. Mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta.
4. Mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai :

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, selain itu penulis dapat membandingkan antar teori dan praktek yang terjadi di lapangan.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten

Sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam pengalokasian dana pembangunan kepada pemerintah tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan sesuai dengan kondisi alamnya serta sumber daya manusia yang dapat dikembangkan.

3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat dijadikan inspirasi maupun sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis. Selain itu penelitian ini juga berguna meningkatkan keterampilan dan memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tiga bagian: pertama, berisi pendokumentasian dan pengkajian dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Kedua: mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Landasan teori ini berisi teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Ketiga: merupakan formalisasi hipotesis. Hipotesis ini dipandang sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah, sehingga hipotesis yang disusun adalah merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Menguraikan tentang deskripsi data penelitian dan penjelasan tentang hasil dari analisis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang dua hal yaitu, kesimpulan yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran terhadap kekurangan yang didapat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Pada bab ini akan memuat dan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan indeks pembangunan manusia, pendapatan asli daerah, upah minimum kabupaten, dan jumlah penduduk dan dampaknya terhadap ketimpangan ekonomi. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah sebagai referensi dan data pendukung dalam penelitian, sekaligus memperkuat hasil analisis, adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:

NO	PENULIS DAN JUDUL	VARIABEL DEPENDEN	VARIABEL INDEPENDEN	ALAT ANALISIS	HASIL
1	Fitri Zahara (2013) Pertumbuhan dan Ketimpangan Ekonomi di DIY Tahun 2006-2011	Ketimpangan (indeks theil)	Jumlah penduduk (JP), jumlah penduduk miskin (JPM), dan data pertumbuhan ekonomi	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan variabel JP, JPM, dan data pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan dan ketimpangan ekonomi.
2	Zulkarnaen Mardiansyah (2016) Analisis Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/kota di Bakorwil Madiun	Indeks enthropi theil	X1 = IPM X2 = PDRB per kapita X3 = PAD	Regresi Linier Berganda	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan regional, Pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan

	Tahun 2009-2014				terhadap ketimpangan regional, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan dan negative terhadap ketimpangan regional.
3	Syahida Syita (2015) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi DIY Tahun 2008-2014	Ketimpangan pendapatan daerah (indeks theil)	Pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk bekerja, pengeluaran pemerintah, investasi	Regresi Linier Berganda	Perumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, pengeluaran pemerintah perpengaruh positif terhadapat ketimpangan pendapatan, dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
4	Hanif Setiawan (2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/kota di	Ketimpangan regional (indeks enthropi theil)	X1 = PDRB X2 = IPM X3 = Industri X4= Pariwisata	Regresi data panel	Variabel PDRB perpengaruh signifikan postif, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan negatif

	Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015				terhadap ketimpangan, variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan, dan variabel pariwisata berpengaruh signifikan negatif terhadap ketimpangan.
5	Siti Rizkiya (2014) Analisis Pertumbuhan dan Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009-2012	PDRB	Data sensus sosial, pendapatan perkapita, jumlah penduduk	Analisis topologi klasen, indeks Williamson, dan indeks theil	Dari hasil perhitungan indeks Williamson diketahui nilai kesenjangan PDRB setiap tahunnya mengalami naik turun (fluktuatif), sedangkan menurut perhitungan indeks theil diketahui nilai kesenjangan cenderung menurun setiap tahunnya.
6	Dhimas Wahyu Setyawan (2016) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi DIY Tahun 2010-2014	Ketimpangan pendapatan	PDRB, inflasi, pengeluaran pemerintah, dan indeks pembangunan manusia (IPM)	Regresi Linier Berganda	PDRB dan inflasi berpengaruh negative terhadap distribusi pendapatan, pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, dan indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh tidak signifikan terhadap

					ketimpangan distribusi pendapatan
7	Ma'mun Musfidar (2010) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010	PDRB	Jumlah penduduk, UMR, Kontribusi sektor industri	Regresi Linier Berganda	Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB, Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh negative signifikan terhadap PDRB, dan kontribusi sektor industri berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB.
8	Crossandra Undulifolia (2012) Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2005-2009	PDRB	PDRB perkapita, Jumlah penduduk kecamatan, jumlah penduduk kabupaten	Regresi Linier Berganda	PDRB perkapita dan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan dan ketimpangan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Kudus
9	Ngakan Putu Mahesa (2010) Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar.	Indeks Enthropi Theil	PDRB perkapita, jumlah penduduk, laju pertumbuhan ekonomi	Regresi Linier Berganda	PDRB Perkapita dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap indek ketimpangan pendapatan, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks ketimpangan pendapatan.
10	Devi Nurita Noviana (2014)	PDRB	Jumlah penduduk,	Indeks Williamson	Hasil dari penelitian menunjukkan rata-

	Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2003-2012		data geografis	dan indeks theil	rata indeks Williamson yaitu 0,463 dan fluktuatif dari tahun ke tahun. sedangkan hasil dari indeks theil menunjukkan angka rata-rata 1,457 dan cenderung fluktuatif setiap tahunnya.
11	Vredrich Bantika (2013) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Utara	Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Indeks gini)	Jumlah Penduduk, Luas Lahan Pertanian, Pertumbuhan ekonomi.	Regresi Linier Berganda	Pertumbuhan Ekonomi dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signfikan terhadap indeks gini, sedangkan luas lahan pertanian tidak berpengaruh signifikan.
12	Sinaga (2010) Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Selatan Tahun 2004-2007	PDRB per kapita	Angka harapan hidup, rasio melek huruf, pendapatan asli daerah (PAD), Pengeluaran pemerintah	Regresi Linier Berganda	Angka harapan hidup dan rasio melek huruf berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negarif dan tidak signifikan terhadap PDRB perkapita.
13	Nurhuda (2013) Analisis Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jawa	Indeks Theil	PAD, DAU, dan IPM	Regresi Linier Berganda	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap Indeks

	Timur Tahun 2005-2011.				Theil. Sedangkan Dana Anggaran Umum (DAU) tidak diketahui pengaruhnya karena tidak memenuhi syarat dalam uji asumsi klasik.
14	Ayu Tiffani(2015) Analisis Ketimpangan PDRB Per Kapita Antar Daerah Tahun 2014	PDRB	Pmdn, Pma, Kependudukan, Panjang Jalan, Pdrbkeu	Regresi Linier Berganda	PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita, PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita,kepadatan penduduk berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita, panjang jalan berpengarung signifikan terhadap PDRB perkapita, dan PDRB keuangan berpengaruh signifikan negative terhadap PDRB perkapita
15	Linda Faricha Rachma(2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Kecamatan di Kabupaten	PDRB	PDRB per kapita, jumlah penduduk, laju pertumbuhan ekonomi	Indeks Williamson dan indeks theil.	Hasil penelitian menunjukkan indeks ketimpangan Williamson dan Entropi Theil di Kabupaten Grobogandilihat secara rata-rata PDRB per kapita antar kecamatan

	Grobokan Tahun 2010-2014				mengalami kesenjangan yang rendah meskipun ketimpangan berdasarkan indeks Entropi Theil terus meningkat yang dapat dilihat dari nilai kesenjangan yang terjadi antar Kecamatan di Kabupaten Grobogan selama tahun 2010-2014 bersifat naik
16	Ilham Farih Muhaimin(2013) Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2007-2011	Distribusi pendapatan	Inflasi, PDRB, UMP, Kemiskinan	Regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Inflasi, Kemiskinan, dan UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Distribusi pendapatan Sedangkan untuk variabel PDRB tidak signifikan terhadap distibusi pendapatan.
17	M Irfan Rosyadi (2014) Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi di Pulau Sumatra	PDRB	Inflasi, UMP, Tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi	Regresi Linier Berganda	Variabel inflasi berpengaruh positif terhadap KDP, UMP berpengaruh Positifterhadap KDP, Tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap KDP dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap

					KDP.
18	Rifka Khairunisa(2016) Identifikasi Sektor Unggulan dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Sleman Provinsi DIY Tahun 2009-2013	PDRB	Jumlah penduduk Sleman, jumlah penduduk per kecamatan	Analisis topologi klasen, indeks Williamson , dan indeks enthropi theil	Hasil perhitungan indeks Williamson diketahui nilai kesenjangan PDRB perkapita cenderung naik turun (fluktuatif), sedangkan menurut perhitungan indeks enthropi theil cenderung menurun dari tahun ke tahun.
19	Nitra Agustina (2014) Pengaruh Struktur Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2000-2013	Indeks gini	X1= SI, X2= SK X3= SPD	Analisis regresi berganda	Variabel share industri perdagangan (SI) perpengaruh negative namun signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, variabel share keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan (SK) perpengaruh positif dan sgnifikan, sedangkan variabel share perdagangan (SPD) berpengaruh postif dan tidak singnifikan terhadap ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta.
20	Ahmad Pauzi (2013) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Secara Langsung Maupun Tidak	Ketimpangan distribusi pendapatan	Ekspor, penanaman modal asing, dan pertumbuhan ekonomi	Regresi Linier Berganda	Ekspor dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan,

	Langsung Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali				penanaman modal asing tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
21	Amelia Beta Rosenda (2014) Analisis Sektor Unggulan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012	PDRB	PDRB Per kapita, jumlah penduduk, dan laju pertumbuhan ekonomi	Analisis *Location Quotien (LQ)*	Hasil analisis LQ menunjukkan ada empat kecamatan yang memiliki sektor unggulan lebih dari satu dan ada satu kecamatan yang memiliki satu sektor unggulan. Sektor yang banyak menjadi basis di Kabupaten klaten yaitu sektor pertanian.
22	Khoriana Novia Putri (2016) Ketimpangan Pembangunan Daerah Antar Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2013	PDRB	Jumlah penduduk	Metode topologi klassen, indeks williamson, dan indeks theil	Hasil perhitungan indeks Williamson terjadi ketimpangan di Jawa Tengah yang mencapai nilai 0,162 dan secara umum mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Sedangkan hasil perhitungan indeks enthropi theil nilai mencapai 1,706 dan secara umum nilai ketimpangan mengalami fluktuatif dari tahun ketahun.
23	Devi Retnosari (2016) Analisis Pengaruh Ketimpangan	PDRB perkapita	Jumlah populasi, ILN, IDN, Pengeluaran pemerintah,	Regresi Linier Berganda	Jumlah populasi berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi,

	Distribusi Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat		rasio gini		pengeluaran pemerintah perpengaruh positif, dan investasi luar dan dalam negeri berpengaruh positif signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi.
24	Purwo Nugroho (2014) Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Demak Tahun 2008-2010	Ketimpangan pembangunan wilayah	Pertumbuhan, jumlah tenaga kerja, aglomerasi sektor pertanian, aglomerasi sektor industri	Regresi Linier Berganda	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan ekonomi, jumlah tenaga kerja berpengaruh negative terhadap ketimpangan, kondisi sektor industri dan sektor pertanian berpengaruh positif terhadap ketimpangan di Kabupaten Demak.
25	Sutarno dan Mudrajad Kuncoro (2004) Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas Tahun 1993-2003	PDRB	PDRB perkapita dan jumlah penduduk	Indeks Williamson dan indeks theil	Hasil dari indeks Williamson menunjukkan nilai rata-rata ketimpangan mencapai 0,539, dan nilai ketimpangan rata-rata indeks theil yaitu 1,745 yang menunjukkan tingkat ketimpangan di Kabupaten Banyumas relatif tinggi.
26	Linggar Dewangga Putra (2011) Analisis Pengaruh	PDRB	PDRB perkapita, rasio gini, jumlah	Regresi linier berganda	PDRB perkapita dan rasio gini berpengaruh positif dan signifikan

	Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2007		penduduk, jumlah penduduk miskin		terhadap PDRB, sedangkan jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin berpengaruh negative terhadap PDRB.
27	Tutik Yuliani (2014) Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Kalimantan Timur	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Theil)	Pendapatan Perkapita,	Regresi *Ordinary least squared* (OLS)	Pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kalimantan Timur.
28	Putri, Amar, dan Aimon (2012) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.	Pertumbuhan ekonomi	Otonom fiskal, rasio pajak, investasi, produktivitas tenaga kerja, IPM	*Least Squared Method* (ILS)	Otonomi fiskal, rasio pajak, dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan produktvitas tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
29	Adipuryanti dan Sudibia (2015) Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi	PDRB	Jumlah penduduk yang bekerja dan investasi	Regresi Linier Berganda	Jumlah penduduk yang bekerja dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

	Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Bali				
30	Lyndon(2001) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan Pendapatan di Indonesia Tahun 1980-1996	Indeks gini	Penduduk usia 60 tahun keatas, pendidikan, jumlah penduduk bekerja, pertumbuhan pendapatan.	*Generalized Least Squares* (GLS)	Kenaikan penduduk usia 60 ke atas secara signifikan menurunkan kesenjangan pendapatan, kenaikan penduduk bekerja dan terdidik meningkatkan kesenjangan pendapatan rumah tangga dan Pertumbuhan pendapatan menurunkan kesenjangan pendapatan rumah tangga.
31	Saputro (2010) Analisis Ketimpangan Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten/kota di Jawa Tengah	Penerimaan sektor pariwisata	Jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, investasi, PDRB	Regresi Linier Berganda	Jumlah wisatawan dan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan sektor pariwisata, sedangkan jumlah obyek wisata dan investasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan sektor pariwisata.
32	Jamzani (2010) Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional di DIY	Pendapatan regional	Modal asing, ekspor, PDRB	Regresi Linier Berganda	Modal asing, ekspor, dan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan

	dan Jawa Tengah.				pendapatan regional di DIY dan Jawa Tengah.
33	Mopangga (2011) Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo	Indeks Theil	PDRB perkapita, IPM, Rasio belanja infrastruktur	Regresi Linier Berganda	Variabel PDRB perkapita menunjukkan hasil yang tidak signifikan dan negatif terhadap Indeks Theil, Sedangkan variabel indeks pembangunan manusia (IPM) dan rasio belanja infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Theil.
34	Ginting (2014) Analisis Ketimpangan Pembangunan di Indonesia	PDRB	PDRB perkapita, invetasi, dan aglomerasi	Regresi Linier Berganda	Variabel PDRB perkapita dan Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB. Sedangkan variabel aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.
35	Rosmeli (2013) Dampak Belanja Daerah Terhadap Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Jambi	Ketimpangan daerah (Indeks Williamson)	Belanja Daerah	Analisis Indeks Williamson	Berdasarkan hasil Indeks Williamson ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jambi dari tahun 2001-2013 masih tergolong sedang.
36	Restiatun (2009) Identifikasi Sektor Unggulan dan Ketimpangan Antar	PDRB	PDRB perkapita, pendapatan pariwisata, PAD	Tipologi klassen	Hasil menunjukkan kecenderungan disparitas meningkat dari waktu ke waktu. Kota Jogja termasuk

	Kabupaten/kota di Provinsi DIY				dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh, sedangkan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo termasuk dalam klasifikasi daerah yang relatif terpencil.
37	Barika (2012) Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.	Ketimpangan Daerah	Pengeluaran pemerintah, pertumbuhan penduduk, investasi swasta	Regresi Linier Berganda	Pertumbuhan penduduk dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan daerah di Provinsi Bengkulu, sedangkan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh positif.
38	Efriza (2014) Analisis Kesenjangan Pendapatan Antar Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur di Era *Desentralisasi Fiscal*	Kesenjangan pendapatan (Indeks Theil)	Angka buta huruf, inflasi, tingkat penganggura n, IPM	Regresi Linier Berganda	Variabel angka buta huruf, inflasi, tingkat pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap Kesenjangan pendapatan.
39	Putri (2015) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di	Ketimpangan pendapatan	Rasio pajak, investasi, produktifitas tenaga kerja, IPM	Metode Least Squared	Variabel rasio pajak dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel produktifitas tenaga kerja dan indeks pembangunan

	Indonesia Tahun 2008-2012				manusia (IPM) secara signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.
40	Putri Wahyuni (2014) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2000-2012	Ketimpangan Pendapatan	Pengeluaran pemerintah, investasi	Regresi Linier Berganda	Variabel pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah daerah daerah yang maju, berkembang, atau terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama bersekolah, dan kemampuan daya beli masyarakat.

Menurut teori semakin tinggi IPM maka menandakan daerah tersebut maju dan semakin tinggi IPM dapat menurunkan tingkat ketimpangan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Setiawan (2016), putri (2015) dan Nurhuda (2013) bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

"H1: IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta."

Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim,2004). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Semakin tinggi PAD maka menandakan kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan. Maka semakin tinggi PAD dapat menurunkan ketimpangan pendapatan antar kabupaten. Dalam penelitian Mardiansyah (2016), Sinaga (2010), dan Nurhuda (2013) PAD berpengaruh negatif terhadap ketimpangan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

“H2: PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta.”

Hubungan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan garis minimal dari pendapatan masyarakat yang bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam bekerja, apabila UMK meningkat maka konsumsi dan tabungan masyarakat juga akan meningkat. Semakin tinggi UMK maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat sehingga akan menurunkan ketimpangan,. Hasil dari penelitian Musfidar (2010) menunjukkan UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Maka hipotesis yang dapat disimpulkan yaitu :

“H3: UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta”.

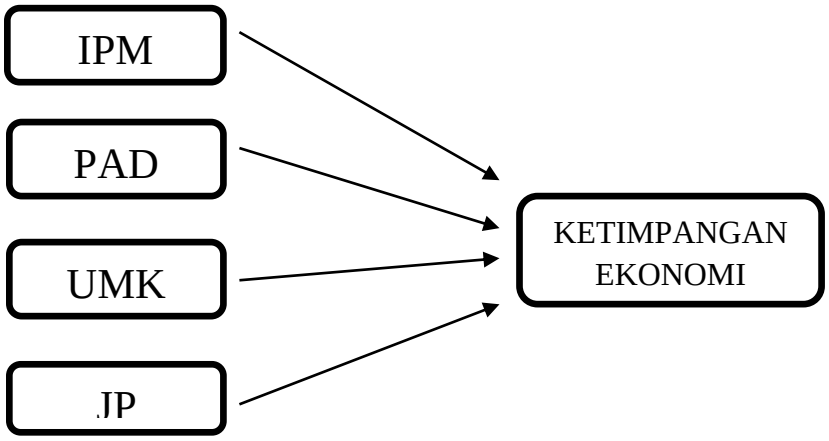
Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

Jumlah Penduduk (JP) merupakan besarnya populasi disetiap daerah. Menurut teori klasik semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin banyak tenaga kerja yang dapat dikerjakan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Semakin tinggi Jumlah Penduduk maka akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan. Teori ini sesuai dengan penelitian Undulifolia (2012) dan putra (2011) bahwa Jumlah penduduk

berpengaruh negatif terhadap ketimpangan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

"H4: JP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta".

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh dengan jalan penelitian (Dantes, 2012).

Dalam penelitian ini, analisis menggunakan hipotesis sebagai berikut:

1. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta.
2. PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta.
3. UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta.

4. JP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta.
5. Semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2.4Landasan Teori

2.4.1. Definisi Kesenjangan

Kesenjangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Sebab kesenjangan antar wilayah yaitu adanya faktor anugerah awal (*Edowment Factor)*. Perbedaan inilah yang menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah-daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno,1985).

Adelman dan Moris (1973) berpendapat bahwa kesenjangan pendapatan di daerah ditentukan oleh jenis pembangunan ekonomi yang ditujukan oleh ukuran negara, sumber daya alam dan kebijakan yang dianut. Dengan kata lain, faktor kebijakan dan dimensi struktural perlu diperhatikan selain laju pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 1997).

2.4.2. Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan yang paling lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi sering digunakan sebagai indikator perbedaan pendapat per kapita rata – rata, antar kelompok tingkat

pendapatan, antar kelompok lapangan kerja, dan atau antar wilayah. Pendapatan perkapita rata – rata suatu daerah dapat disederhanakan menjadi produk domestik regional bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Cara lain yang bisa digunakan adalah dengan mendasarkan kepada pendapatan personal yang didekati dengan pendekatan konsumsi (Widiarto, 2001). Ketimpangan ekonomi mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Pada tingkat ketimpangan maksimum, kekayaan hanya dimiliki satu orang saja, dan tingkat ketimpangan sangat tinggi (Kuncoro, 1997 : 103).

Dalam pengukuran ketimpangan ekonomi digunakan indeks Williamson. Ketimpangan ekonomi di Indonesia yang diukur dengan indeks Williamson dari tahun 1971 hingga tahun 1990 berkisar antara 0,396 sampai 0,484. Hal ini menunjukkan ada peningkatan ketimpangan ekonomi tetapi masih relatif sedang. Indeks ketimpangan ekonomi dari tahun 1991 hingga 1997 berkisar 0,643 sampai 0,671 berarti mengalami kenaikan cukup tinggi (Syafrizal, 1997).

2.4.3. Konsep Ketimpangan Antar daerah

Adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah. Untuk menghitung ketimpangan ekonomi digunakan indeks

ketimpangan Wiliamson dan indeks ketimpangan Entropi Theil (Kuncoro,2004).

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, kesenjangan atau ketimpangan daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan *(backwash effect)* mendominasi pengaruh yang menguntungkan *(spread effect)* terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini menyebabkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai kekuatan dipasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya menurun, sehingga akan mengakibatkan peningkatan ketimpangan antar daerah. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro,2000).

Wie (1981) menyatakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan dari sudut pandangan ekonomi dibagi menjadi:

1. Ketimpangan pembagian pendapatan antar golongan penerima pendapatan *(size distribution income)*
2. Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan *(urban-rural income disparities)*

3. Ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah *(regional income disprities)*

Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah dengan daerah lain adalah merupakan suatau yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah. Analisis yang menggabungkan tahap pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan serta ungkapan pertumbuhan *versus* pemerataan sebenarnya dipicu oleh sebuah penemuan yang dimulai oleh Simon Kuznets.

Simon Kuznets menghubungkan laju pertumbuhan berbagai negara maju dan negara sedang berkembang dengan mengamati data *time series* untuk Amerika, Inggris dan Jerman serta *croos section* yang mencangkup negara tersebut ditambah India, Srilanka serta Puerto Riko dan hasil pengamatan tersebut Kuznest menemukan sebuah pola yang berbentuk U terbalik. Pola tersebut mensyaratkan bahwa pada tahap awal perkembangan (diwakili oleh PDB perkapita yang masih rendah), maka proses pertumbuhan diikuti oleh semakin memburuknya distribusi pendapatan dan setelah mencapai titik tertentu, pembangunan akan diikuti oleh membaiknya pemerataan. Pembangunan dengan hasil seperti digambarkan oleh hipotesis U terbalik sebagian besar didasarkan pada model pembangunan dualistik (Ismail, 1995).

2.4.4. Faktor-Faktor Ketimpangan Ekonomi

Kuznets menyebutkan bahwa diantara faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi pola U, terdapat faktor penting yaitu terpusatnya modal pada kelompok pendapatan tinggi dan adanya pergeseran penduduk dari sektor pertanian tradisional menuju sektor industri modern. Satu dekade setelah adanya hipotesis Kuznets, Wiliamson (1965) juga menjelaskan hipotesa U terbalik pada lingkup wilayah bahwa pada saat pendapatan perkapita meningkat, akan terjadi peningkatan kesenjangan wilayah, lalu bertahan dalam jangka waktu tertentu dan kemudian menurun. Implikasi yang dapat diturunkan bahwa ketimpangan pendapatan antar daerah merupakan konsekuensi dari pembangunan dan akan hilang dengan kedewasaan pembangunan itu sendiri.

Wiliamson menganalisa empat faktor yang mendasari pola U terbalik dalam pengembangan wilayah yaitu: sumber daya alam, perpindahan tenaga kerja, perpindahan modal dan kebijakan pemerintah pusat. Wiliamson menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya alam yang berbeda akan menimbulkan pertumbuhan yang tidak seimbang pada tahap awal pembangunan. Dengan hipotesis U terbalik menyimpulkan bahwa kekuatan hukum ekonomi akan menyeimbangkan kesenjangan antar daerah. Robinson (1976) dengan hipotesa-U terbalik menyimpulkan bahwa kekuatan hukum ekonomi akan menyeimbangkan kesenjangan antar daerah.Faktor-faktor penyebab ketimpangan:

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Ekonomi daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

2. Alokasi mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah

   Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal antar kecamatan juga merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah.

3. Perbedaan sumber daya alam

   Dasar pemikiran klasik sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya akan lebih makmur dibanding daerah yang miskin sumber daya alam. Hingga tingkat tertentu, anggapan ini masih dibenarkan. Dalam arti sumber daya alam harus dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembangunan, yang selanjutnya harus dikembangkan terus. Untuk tercapainya tujuan ini diperlukan faktor-faktor lain yaitu teknologi dan sumber daya manusia.

4. Perbedaan kondisi demografi antar wilayah

   Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah juga disebabkan oleh perbedaan kondisi demografis antar kabupaten, terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk.

5. Kurang lancarnya perdagangan antar provinsi.

Kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga menyebabkan ketimpangan ekonomi regional di Indonesia. Pada umumnya ketidaklancaran tersebut disebabkan karena keterbatasan transportasi dan komunikasi. Perdagangan antar provinsi meliputi barang jadi, barang modal, input perantara, dan bahan baku untuk keperluan produksi dan jasa.

2.4.5. Teori-Teori Kesenjangan Ekonomi

Menurut teori Neo Klasik ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut dapat mencapai keseimbangan kembali dengan sendirinya, karena daerah-daerah tertinggal akan dengan sendirinya konvergen dengan daerah yang lebih maju. Para ekonom Neo Klasik seperti Solow (1956), Suan (1956) dan Meade (1961) mengajukan model pertumbuhan dengan menggunakan beberapa asumsi (Sukirno, 1981) sebagai berikut (1) *Full employment*; (2) Persaingan sempurna; (3) Komoditi Homogen; (4) Ongkos transportasi nol; (5) *Constant return to scale*antar wilayah; (6) *Supply* tenaga kerja tetap; (7) Tingkat teknologi tetap. Berdasarkan asumsi tersebut, maka tingkat upah merupakan fungsi langsung dari rasio kapital dan tenaga kerja, sehingga akan terjadi pergerakan tenaga kerja dari daerah yang tingkat upahnya rendah ke daerah yang tingkat upahnya tinggi. Sementara modal bergerak sebaliknya.

Kekuatan konvergensi potensial lainnya (Glasson, 1990) antara lain alokasi sumber daya di daerah yang berangkat dari sektor upah rendah (seperti sektor pertanian) ke sektor dengan upah yang tinggi, dengan

produktivitas tinggi akan menaikkan pendapatan rata-rata perkapita serta adanya ciri-ciri kematangan dalam daerah-daerah yang sudah lama berpendapatan tinggi yang dapat memperlambat kenaikan pendapatan perkapita di masa mendatang.Salah satu kelompok dari teori pertumbuhan daerah yang jelas-jelas mengakui bahwa pertumbuhan daerah itu mungkin saja bersifat divergen dan bukannya konvergen, adalah teori-teori *centre-periphery* dari Hirschman, Friedman dan Myrdal (Glasson, 1990).

Myrdal dan Hirschman dalam teorinya tentang kesenjangan pembangunan ekonomi menyatakan bahwa kekuatan divergensi adalah lebih kuat daripada kekuatan konvergensidalam pola pertumbuhan ekonomi. Argumen umum dari teori dapat dijelaskan dengan membandingkan peruntungan dari dua daerah, A dan B. Pada mulanya daerah A berkembang lebih cepat daripada B, karena ia mempunyai kemanfaatan-kemanfaatan alamiah dan/atau buatan manusia. Akan tetapi bertentangan dengan banyak teori pertumbuhan, divergensi ini mungkin tidak akan hilang dengan sendirinya dan proses ini malahan dapat menjadi kumulatif, dimana yang kaya bertambah kaya dan yang miskin bertambah miskin.

Menurut Myrdal (Sukirno, 1981) dalam jangka panjang pendapatan perkapita antar daerah cenderung timpang. Perbedaan tersebut menurutnya disebabkan adanya dua faktor yaitu *backwash effect* dan*spread effect*. Pembangunan ekonomi antar wilayah akan menimbukan adanya *backwash effect* yang mendominasi *spread effect* dan pertumbuhan ekonomi regional merupakan proses yang tidak ekuilibrium. *Spread effect* adalah

kekuatan yang menuju konvergensi antara daerah-daerah kaya dan daerah daerah miskin. Dengan bertumbuhnya daerah kaya, maka bertambah pula permintaannya terhadap produk dari daerah yang tertinggal seperti hasil pertanian dan hasil industri barang konsumsi, dengan demikian akan menimbulkan pertumbuhan. Dari masa ke masa daerah yang lebih maju akan menjadi daya penarik bagi penduduk daerah terbelakang, untuk mengadakan migrasi karena adanya keyakinan untuk mendapatkan gaji yang lebih baik/ prasarana sosial yang lebih baik di daerah yang lebih maju.

Perroux menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak merata terjadi di berbagai daerah, tetapi mengelompok pada pusat-pusat pertumbuhan dan hal ini akan menentukan perkembangan ekonomi daerah lain yang lebih lambat perkembangan ekonominya.Teori Hechsher-Ohlin (Amirrudin,1992) yang dikenal sebagai teori H-O menjelaskan pula penyebab kesenjangan antar daerah. Hechsher-Ohlin mencoba menjawab mengapa perdagangan cenderung pada suatu wilayah tertentu dan menuju pada polarisasi. Hechsher-Ohlin percaya pada *endowment factor* yang dimiliki masing-masing daerah, sehingga daerah mempunyai *comparative adventage* dibanding yang lain dan ini dapat menaikan pendapatan daerah tersebut. Hilhorst (1968) menyangkal pendapat teori H-O yang menyatakan keunggulan *comparative* sebagai penyebab terjadinya perdagangan internasional. Menurut Hilhorst (Hilhorst dalam Amirrudin 1992), ada faktor-faktor lain sebagai penyebab perdagangan inter-nasional misalnya kelancaran transportasi dan komunikasi muncul dan kebijaksanaan

pemerintah yang menyebabkan kemudahan-kemudahan serta adanya jalinan kerjasama antar sesama rekanan usaha. Dengan adanya transportasi dan komunikasi, faktor-faktor produksi yang *inmobile* (tidak bergerak) diantara dua wilayah mulai hilang dan faktor *endowment* cenderung merata.

Kebijakan alokasi investasi daerah menjadi penting bila tujuan pembangunan wilayah yang dicapai yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, karena dengan hal itu dapat ditentukan prioritas-prioritas yang akan dilaksanakan (Sjafrizal,1983). Dalam hal pemerataan, Rahman (2011) berpendapat bahwa unsur pemerataan pembangunan antar wilayah dapat dipertimbangkan melalui pelaksanaan *switching policy*. Bila menurut analisa alokasi anggaran perlu lebih banyak diarahkan pada daerah yang relatif maju, maka setelah mencapai titik tertentu maka prioritas alokasi anggaran harus dibelokkan ke daerah yang kurang maju. Dengan demikian unsur pertumbuhan dan unsur pemerataan akan dapat dipertimbangkan secara sekaligus.

2.4.6. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Para ekonom memberikan pengertian yang sama mengenai pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai kenaikan GDP/GNP saja tanpa

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad,1999).

Menurut Kuznets (1995) pertumbuhan ekonomi sebagai "kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya". Kemampuan tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai tiga komponen: *Pertama,* pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang: *Kedua,* teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk: *Ketiga,* penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasikan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan,2000).

Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada tingkat apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Disini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis. Para teoritikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para

teoritikus menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB atau PDRB saja, akan tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan oleh masyarakat luas (Arsyad,1999:141).

Sedangkan menurut Todaro (1993), pembangunan di semua negara memiliki tiga sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.
2. Meningkatkan taraf hidup, termasuk menambah dan mempertinggi penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik dan memperhatikan nilai-nilai budaya dan kemanusiaan.
3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain dan negara-negara lain, tetapi juga sumber-sumber kebodohan dan penderitaan manusia.

2.4.7. Definisi Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah salah satu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor

swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1992). Pembangunan ekonomi daerah bukan berdasarkan atas aspirasi masyarakat daerah, melainkan lebih sebagai pembangunan yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk dilakukan didaerah (Kuncoro & Matsui, 2003).

2.4.8. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara/daerah merupakan negara atau daerah yang maju, berkembang, atau terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitungberdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak.

Secara umum metode penghitungan IPM yang digunakan di Indonesia sama dengan metode penghitungan yang digunakan oleh UNDP. IPM di Indonesia disusun berdasarkan tiga komponen indeks, yaitu:

1. Indeks angka harapan hidup ketika lahir

2. Indeks pendidikan, yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah (rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani) dan angka melek huruf latin atau lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih).
3. Indeks standar hidup layak, yang diukur dengan pengeluaran perkapita (PPP-*Purchasing Power Parity*/paritas daya beli dalam rupiah).

   IPM merupakan rata-rata dari ketiga komponen tersebut, dengan rumus:

   IPM = (X1+X2+X3)/3

   keterangan:

   X1 = angka harapan hidup

   X2 = tingkat pendidikan

   X3 = tingkat kehidupan yang layak

2.4.9. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim,2004). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

2.4.10. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semain berkurang dan pada akhirnya dapat menjadi mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V nomor satu disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

A. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kebutuhan rakyat. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda, yaitu:

1. Sebagai sumber pendapatan daerah
2. Sebagai alat pengatur

B. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut olehdaerah yang dikelompokkan kedalam tiga golongan retribusi, yaitu:

1. Retribusi jasa umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi jasa usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus oleh pemerintah daerah untuk kepetingan orang pribadi atau badan.

C. Hasil Pengolahan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengolahan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencangkup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok tertentu.

D. Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang Sah, disediakan untuk menganggarkan

penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.4.11. Upah Minimum Kabupaten

Menurut Sadono (2006), upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Sementara itu menurut Sumarsono (2003) perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut.

Pertama, naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi

mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi tersebut dengan efek skala produksi atau *scale effect.*

Kedua, apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lain tidak berubah) maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya pergantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja (*substitution effect).*

2.4.12. Indeks Enthropi Theil

MenurutYing (2000) untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto provinsi, menggunakan Entropi Theil. Indeks Entropi Theil tersebut dapat dibagi atau diurai menjadi dua subindikasi, yaitu ketimpangan ekonomi dalam wilayah dan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Indeks ketimpangan Entropi Theil juga dapat menyediakan pengukuran ketimpangan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan

konsentrasi geografis selama periode tertentu dan yang kedua ketika mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai ketimpangan spasial.

Data yang diperlukan untuk menghitung indeks Entropi Theil sama dengan yang diperlukan untuk menghitung Indeks Williamson yaitu PDRB per kapita dan jumlah penduduk untuk setiap wilayah. Penafsiran indeks ini dengan indeks Williamson sama yaitu bila indeks mendekati 1 artinya sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti sangat merata (Sjafrizal, 2012).

Sedangkan formulasi Indeks Entropi Theil tersebut sebagai berikut (Kuncoro, 2004):

$$I(y)= \sum(y_j/Y) \times \log (y_j/Y) / (x_j/X)$$

Keterangan:

I(y) : Indeks Entopi Theil

y_j : PDRB per kapita kabupaten/kota j

Y : Rata-rata pendapatan perkapita kabupaten

x_j : Jumlah penduduk per kabupaten/kota j

X : Jumlah penduduk di Provinsi Yogyakarta

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah ketimpangan ekonomi (indeks Entropi Theil) sebagai variabel dependen, sedangkan untuk variabel independennya ialah Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Kabupaten, dan Jumlah Penduduk. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan menggunakan data panel dari tahun 2012 – 2016.

3.1.2. Definisi Operasional

1. Indeks Entropi Theil digunakan untuk mengukur dan mengetahui tingkat ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Dalam penelitian ini data indeks Entropi Theil dalam bentuk angka satuan dimana 0 adalah yang paling kecil dan menandakan bahwa tingkat ketimpangan merata dan semakin besar angka menandakan semakin besar jurang ketimpangan yang terjadi.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau disebut juga dengan Human Development Index (HDI). IPM adalah indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan,

pendidikan, maupun aspek ekonomi. Dalam penelitian ini satuan data IPM adalah dalam indeks poin. Semakin tinggi angka Indeks Pembangunan Manusia, maka kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup akan semakin baik.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri dan digunakan pemerintah daerah untuk dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.Data Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari laporan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Yogyakarta dengan menggunakan satuan rupiah.
4. Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan garis minimal dari pendapatan masyarakat yang bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam bekerja, apabila UMK meningkat maka konsumsi dan tabungan masyarakat juga akan meningkat. Akan tetapi UMK disetiap daerah berbeda-beda nilainya, jadi distribusi pendapatan antar kabupaten juga akan dipengaruhi oleh tingkat UMK.
5. Jumlah Penduduk (JP) merupakan besarnya populasi disetiap daerah. Semakin tinggi jumlah penduduk disetiap daerah maka menandakan semakin tinggi biaya tanggungan pemerintahuntuk mensejahterakan penduduknya seperti biaya sekolah dan kesehatan.

3.2 Data dan Sumber Data

3.2.1 Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Data sekunder yaitu data yang bersumber pada instansi pemerintah yang telah dipublikasikan dan data yang diolah kembali dari data yang diterbitkan oleh instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah yang diakui dan mempunyai legalitas dalam menerbitkan data statistik di Indonesia, berbagai website serta berbagai instansi dan literatur-literatur lain yang terkait dengan penelitian ini.

Data peneliti yang digunakan yaitu :

1. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten di DIY tahun 2012-2016.
2. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten di DIY Tahun 2012 – 2016.
3. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten di DIY Tahun 2012 – 2016.
4. Jumlah Penduduk (JP) Kabupaten di DIY Tahun 2012 – 2016.

3.2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari periode 2012-2016 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Provinsi Yogyakarta,internet, jurnal dan penelitian terdahulu,

dan literatur – literatur yang terkait dengan penelitian ini.Data yang diperlukan antara lain berupa Indeks enthropi theil, IPM(Indeks Pembangunan Manusia), PAD (Pendapatan Asli Daerah), UMK (Upah Minimum Kabupaten), dan JP (Jumlah Penduduk).

3.3 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data panel, yang artinya adalah gabungan antara data silang *(cross section)* dengan data runtut waktu *(time series).* Sebagai hasilnya data set panel akan berisikan informasi observasi setiap individual data sampel. Data panel dapat berguna bagi peneliti untuk melihat dampak ekonomis yang tidak bisa terpisahkan antar setiap individu dalambeberapa periode. Hal ini tidak bisa didapatkan dari penggunaan data *cross section* atau data *time series* secara terpisah.Terdapat beberapa keuntungan dari penggunaan metode panel yaitu :

1. Mengingat penggunaan data panel juga meliputi data *cross section* dalam rentang waktu tertentu, maka data set akan rentan dari heterogenitas. Penggunaan teknik dan estimasi data panel akan memperhitungkan secara eksplisit heterogenitas tersebut.
2. Dengan pengkombinasian, data akan memberikan informasi yang lebih,tingkat kolinearitas yang lebih kecil antar variabel dan lebih efisien.
3. Penggunaan data panel mampu meminimalkan *bias* yang dihasilkan jika kita mengagregasikan data individu ke dalam agregasi yang luas.

Ada 3 model yang dapat digunakan untuk menafsirkan data panel yaitu:

1) Pooled Least Square (PLS) atau metode Common
2) Fixed Effect Model (FEM)
3) Random Effect Model (REM)

3.3.1. Model Regresi Data Panel

$$Yit = \beta_0 + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 PAD_{it} + \beta_3 UMK_{it} + \beta_4 JP_{it} + U_{it}$$

Keterangan :

Y	= Indeks Theil
β0	= Koefisien intersep
β1	= Koefisien pengaruh IPM
β2	= Koefisien pengaruh PAD
β3	= Koefisien pengaruh UMK
β4	= Koefisien pengaruh JP
i	=Kabupaten/kota di Provinsi Yogyakarta (5 kabupaen/kota)
t	= Waktu (tahun 2012-2016)
Ut	= Variabel pengganggu

3.3.2. Metode Estimasi Data Panel

1. *Common Effect*

   Merupakan pendekatan yang paling sederhana yang disebut CEM atau *pooled least square*, dimana pada model ini maka diasumsikan intersep masing – masing koefisien adalah sama, begitu

pula slope koefisien pada data *cross section* dan *time series*nya. Dengan hanya menggabungkan kedua jenis data tersebut maka dapat digunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data antar kabupaten sama dalam berbagai rentang waktu. Asumsi ini jelas sangat jauh dari realita sebenarnya, karena karakteristik antar kabupaten baik dari segi kewilayahan jelas sangat berbeda.

2. *Fixed Effect*

   Merupakan pendekatan dimana merupakan salah satu cara untuk memperhatikan unit *cross section* pada model regresi data panel adalah dengan memperoleh nilai intersep yang berbeda – beda pada setiap unit *cross section* tetapi masih mengasumsikan *slope* koefisien yang tetap. Namun metode ini membawa kelemahan yaitu berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter.

3. *Random Effect*

   Teknik yang digunakan dalam metode Random Effectadalah dengan menambahkan variabel gangguan (*error terms*) yang mungkin saja akan muncul pada hubungan antar waktu dan antar wilayah. Teknik metode OLS tidak dapat digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien, sehingga lebih tepat untuk menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS).

3.3.3. Pemilihan Model Regresi Panel

Penentuan model terbaik antara *common effect, fixed effect, dan random effect* menggunakan dua teknik estimasi model. Dua teknik ini digunakan dalam regresi data panel untuk memperoleh model yang tepat dalam mengestimasi regresi data panel. Dua uji yang digunakan, pertama Chow Test digunakan untuk memilih antara model*common effect* atau *fixed effect*. Kedua, HausmanTest digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* atau *random effect* yang terbaik dalam mengestimasi regresi data panel.

1. Chow Test

   Chow test merupakan uji untuk membandingkan model *common effect* dengan *fixed effect* (Widarjono, 2009). Chow test dalam penelitian ini menggunakan program Eviews. Hipotesis yang dibentuk dalam Chow test adalah sebagai berikut :

   H0 : Model *Common Effect*

   H1 : Model *Fixed Effect*

   H0 ditolak jika P-value lebih kecil dari nilai α. Sebaliknya, H0 diterima jika P-value lebih besar dari nilai α. Nilai α yang digunakan sebesar 5%.α

2. Hausman Test

   Pengujian ini membandingkan model *fixed effect*dengan *random effect* dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel (Gujarati, 2012). Hausman

Testmenggunakan program yang serupa dengan Chow Test yaitu program Eviews. Hipotesis yang dibentuk dalam Hausman Test adalah sebagai berikut :

H0 : Model *Random Effect*

H1 : Model *Fixed Effect*

H0 ditolak jika P-value lebih kecil dari nilai α. Sebaliknya, H0 diterima jika P-value lebih besar dari nilai α. Nilai α yang digunakan sebesar 5%.

3.4 Uji Statistik

Selain uji asumsi klasik, juga dilakukan uji statistik yang dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktualnya. Uji statistik dilakukan dengan koefisien determinasinya (R^2), pengujian koefisien regresi secara serentak (Uji F), dan pengujian koefisien regresi secara individual (Uji T).

1. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar presentase variasi dalam variabel terikat pada model yang diterangkan oleh variabel bebasnya. Nilai R^2 berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Semakin besar R^2, semakin baik kualitas model, karena semakin dapat menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen(Gujarati, 2003).

Adapun kegunaan koefisien determinasi adalah :

1) Sebagai ukuran ketepatan/kecocokan garis regresi yang dibuat dari hasil estimasi terhadap sekelompok data hasil observasi. Semakin besar nilai R^2, maka semakin bagus garis regresi yang terbentuk dan semakin kecil R^2, maka semakin tidak tepat garis regresi tersebut mewakili data hasil observasi.
2) Untuk mengukur proporsi/presentase dari jumlah variasi yang diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan dari variabel x terhadap variabel u untuk mengukur proporsi/presentase dari jumlah variasi yang diterangkan oleh model regresi.

2. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F kritis maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen (Widarjono, 2009). Hipotesis yang digunakan :

H0 : $\beta1= \beta2= \beta3= \beta4= 0$

H1: minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol

Dengan membandingkan nilai prob f-stat dengan α (0,05=5%), jika prob f-stat < α maka menolak H0 maka variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya apabila prob f-stat > α

maka variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen.

3. Uji T

Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

a. Untuk variable IPM

H0 : $\beta 1 \geq 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan variabel IPM terhadap variabel Y

H1 : $\beta 1 < 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan variabel IPM terhadap variabel Y

b. Untuk variable PAD

H0 : $\beta 2 \geq 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan variabel PAD terhadap variabel Y

H1 : $\beta 2 < 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan variabel PAD variabel Y

c. Untuk variabel UMK

H0 : $\beta 3 \geq 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan variabel UMK terhadap variabel Y

H1 : $\beta 3 < 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan variabel UMK terhadap variabel Y

d. Untuk variabel JP

H0 : $\beta 4 \geq 0$, yaitu tidak ada pengaruh signifikan variabel JP terhadap variabel Y

H1 : $\beta 4 < 0$, yaitu terdapat pengaruh signifikan variabel JP terhadap variabel Y

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Apabila t hitung > t kritis, maka H0 ditolak maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya apabila t hitung < t kritis maka variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen (Widarjono, 2009).

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Deskripsi Data

Skripsi ini meneliti mengenai analisis ketimpangan ekonomi yang ada di Provinsi Yogyakarta dengan menggunakan model data panel. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data tersebut dalam bentuk data *cross section* serta data *time series* setiap kabupaten yang ada di Provinsi Yogyakarta pada tahun 2012-2016. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan literatur yang terkait. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Asli Daerah, Upah Minimum Kabupaten, dan Jumlah Penduduk. Sedangkan variabel dependennya adalah Indeks Entrophy Theil.

4.2 Indeks Entrophy Theil

Salah satu penyebab terjadinya ketimpangan adalah tidak meratanya distribusi pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, rumah layak huni, dan pendidikan yang diterima. Minimnya lapangan pekerjaan juga berkaitan dengan meningkatnya jarak ketimpangan yang terjadi, karena daerah yang memiliki fasilitas yang lebih baik seperti prasarana perhubungan, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi jugatenaga terampil mampu menarik investor yang ujungnya dapat meningkatkan ekonomi daerah bersangkutan

Tabel 4.1

Indek Entrophy Theil Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

tahun (2012-2016)

Kabupaten	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
YOGYAKARTA	2.79	2.78	2.79	2.79	2.78
SLEMAN	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46
BANTUL	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24
KULON PROGO	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46
GUNUNG KIDUL	0.32	0.32	0.31	0.31	0.32

Sumber : Data BPS Diolah

Ketimpangan yang dialami Kota Yogyakarta sangatlah tinggi mencapai 2.79 pada tahun 2015. Kabupaten Bantul yang menjadi paling bawah sebesar 0.24 pada tahun 2016. Keadaan ini terjadi dikarenakan besarnya pendapatan per kapita yang dimiliki Kota Yogyakarta dan dengan jumlah penduduk yang paling kecil dari kabupaten lainnya sehingga membuat indek entrophy theil nya sangat tinggi/timpang. Hal ini dikarenakan komponen perhitungan indeks theil menggunakan pendapatan per kapita dan juga jumlah penduduk. Dapat dilihat pada tabel 4.2 bahwa jumlah penduduk Kota Yogyakarta adalah yang paling sedikit dan Kabupaten Sleman menjadi daerah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak.

Tabel 4.2

Data Jumlah Penduduk per Kabupaten di Provinsi Yogyakarta tahun (2012-2016)

Kabupaten	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
YOGYAKARTA	397,594	402,679	407,667	412,104	414,805
SLEMAN	1,128,943	1,141,733	1,154,501	1,167,481	1,182,561
BANTUL	934,674	947,072	959,445	972,511	983,672
KULON PROGO	398,672	403,179	407,709	412,198	415,201
GUNUNG KIDUL	692,579	700,191	707,794	715,282	721,435

Sumber : BPS 2016

4.3 Regresi Data Panel

Analisis hasil regresi ini menjelaskan model regresi dan diuji sesuai dengan persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan model yang terbaik sehingga mampu menjelaskan permasalahan yang hendak dijawab dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Jumlah Penduduk (JP) terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta yang dilakukan pengujian model dengan metode estimasi data panel.

Berikut merupakan hasil regresi data panel dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu *Pooled Least Square* atau metode *Common, Fixed Effect Model,* dan *Random Effect Model.*

4.3.1 Estimasi *Pooled Least Square (Common Effect)*

Hasil pengujian regesi data panel dengan menggunakan metode *Pooled Least Square* adalahsebagai berikut :

Tabel 4.3

Estimasi Output Hasil Regresi PLS

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 12/01/17 Time: 14:51
Sample: 2012 2016
Included observations: 5
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 25

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.340652	2.840403	-0.119931	0.9057
IPM?	0.058744	0.037390	1.571133	0.1318
PAD?	4.62E-09	1.51E-09	3.070159	0.0060
UMK?	-1.97E-06	8.52E-07	-2.315735	0.0313
JP?	-3.11E-06	3.99E-07	-7.793860	0.0000

R-squared	0.794327	Mean dependent var	0.852000
Adjusted R-squared	0.753193	S.D. dependent var	0.990349
S.E. of regression	0.492003	Akaike info criterion	1.596191
Sum squared resid	4.841333	Schwarz criterion	1.839966
Log likelihood	-14.95239	Hannan-Quinn criter.	1.663804
F-statistic	19.31045	Durbin-Watson stat	0.340095
Prob(F-statistic)	0.000001		

Sumber: Hasil olahan data dengan e views 8

Dari hasil pengolahan regresi data panel diatas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R-squared) dari hasil estimasi sebesar 0.794327, yang menunjukkan variabel-variabel independen mampu menjelaskan 79,4327% terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya dijelaskan diluar model.

4.3.2 Estimasi *Fixed Effect Model*

Dari pengujian regresi data panel dengan menggunakan metode *Fixed Effect Model* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4

Estimasi Output Hasil Regresi *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 12/01/17 Time: 14:51
Sample: 2012 2016
Included observations: 5
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 25

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.224008	0.345171	3.546097	0.0027
IPM?	-0.002399	0.004625	-0.518605	0.6111
PAD?	4.85E-11	3.00E-11	1.616054	0.1256
UMK?	3.74E-09	1.86E-08	0.201052	0.8432
JP?	-2.88E-07	2.42E-07	-1.193013	0.2503
Fixed Effects (Cross)				
YOGYA—C	1.841301			
SLEMAN—C	-0.263740			
BANTUL—C	-0.530109			
K_PROGO—C	-0.494567			
G_KIDUL—C	-0.552885			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.999983	Mean dependent var	0.852000
Adjusted R-squared	0.999974	S.D. dependent var	0.990349
S.E. of regression	0.005053	Akaike info criterion	-7.464035
Sum squared resid	0.000408	Schwarz criterion	-7.025240
Log likelihood	102.3004	Hannan-Quinn criter.	-7.342332
F-statistic	115246.1	Durbin-Watson stat	2.279221
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews 8

Dari hasil pengolahan regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* diketahui bahwa nilaikoefisien determinasi (R-squared) dari hasil estimasi sebesar 0.999983, yang menunjukkan variabel-variabel independent mampu

menjelaskan 99,9983% terhadap variabel dependent. Hasil estimasi diatas menunjukkan adanya pengaruh individu dari data *cross section* (kabupaten) pada konstanta model penelitian.

4.3.3 Estimasi *Random Effect Model*

Hasil pengujian regresi data panel dengan menggunakan metode *Random Effect Model* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5

Estimasi Output Hasil Regresi *Random Effect Model*

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 12/01/17 Time: 14:52
Sample: 2012 2016
Included observations: 5
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 25
Swamy and Arora estimator of component variances
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.340652	1.791682	-0.190130	0.8511
IPM?	0.058744	0.020452	2.872319	0.0094
PAD?	4.62E-09	8.00E-10	5.775559	0.0000
UMK?	-1.97E-06	4.46E-07	-4.421286	0.0003
JP?	-3.11E-06	1.30E-07	-23.87633	0.0000
Random Effects (Cross)				
YOGYA—C	2.18E-08			
SLEMAN—C	-5.57E-09			
BANTUL—C	-7.16E-10			
K_PROGO—C	-3.20E-08			
G_KIDUL—C	1.64E-08			

Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	5.07E-07	0.0000
Idiosyncratic random	0.005053	1.0000

Weighted Statistics			
R-squared	0.794327	Mean dependent var	0.852000

Adjusted R-squared	0.753193	S.D. dependent var	0.990349
S.E. of regression	0.492003	Sum squared resid	4.841333
F-statistic	19.31045	Durbin-Watson stat	0.340095
Prob(F-statistic)	0.000001		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.794327	Mean dependent var	0.852000
Sum squared resid	4.841333	Durbin-Watson stat	0.340095

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews 8

Dari hasil pengolahan regresi data panel dengan *Random Effect Model* diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R-squared) dari hasil estimasi sebesar 0.794327, yang menunjukkan variabel-variabel independent mampu menjelaskan 79,4327% terhadap variabel dependent. Hasil estimasi diatas menunjukkan adanya pengaruh individu dari data *cross section* (kabupaten) pada konstanta model penelitian.

4.4 Pemilihan Model

Karena data yang dianalisis merupakan data panel, maka harus ditentukan metode pendekatan analisis. Uji Chow untuk memilih antara *Common Effect* atau*Fixed Effect* dan Uji Hausman untuk memilih antara*Fixed Effect* atau *Random Effect* sehingga mendapatkan pendekatan yang paling tepat terhadap model.

4.4.1 Uji Chow (*Likelihood Ratio Test)*

Chow test dilakukan untuk mengetahui apakah model yang lebih baik untuk digunakan adalah pendekatan *Common Effect* atau pendekatan *Fixed Effect*. Uji ini dilakukan dengan prosedur uji F-statistic dengan hipotesis :

H0 = *Common EffectModel* lebih baik daripada *Fixed Effect Model*.

H1 = *Fixed Effect Model* lebih baik daripada *Common Effect Model.*

Hasil Chow Test adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6

Hasil Pengujian *Likelihood Ratio Test*(Uji Chow)

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: APOOL
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	47402.807623	(4,16)	0.0000
Cross-section Chi-square	234.505669	4	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: Y?
Method: Panel Least Squares
Date: 12/01/17 Time: 14:52
Sample: 2012 2016
Included observations: 5
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 25

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.340652	2.840403	-0.119931	0.9057
IPM?	0.058744	0.037390	1.571133	0.1318
PAD?	4.62E-09	1.51E-09	3.070159	0.0060
UMK?	-1.97E-06	8.52E-07	-2.315735	0.0313
JP?	-3.11E-06	3.99E-07	-7.793860	0.0000

R-squared	0.794327	Mean dependent var	0.852000
Adjusted R-squared	0.753193	S.D. dependent var	0.990349
S.E. of regression	0.492003	Akaike info criterion	1.596191
Sum squared resid	4.841333	Schwarz criterion	1.839966
Log likelihood	-14.95239	Hannan-Quinn criter.	1.663804
F-statistic	19.31045	Durbin-Watson stat	0.340095
Prob(F-statistic)	0.000001		

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews 8

Berdasarkan hasil pengujian di atas diperoleh angka probabilitas *Cross-section* F sebesar 0,000001 dengan demikian maka diketahui bahwa nilai *p-value* lebih kecil dari α (0,05), hasil uji *Chow*adalah menolak

H_0,maka*Fixed Effect Model* lebih baik untuk digunakan daripada *Pooled Least Square (common effect Model*).

4.4.2 Uji Hausman

Hausman Test digunakan untuk memilih pendekatan terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pengujian ini mengikuti distribusi *chi-square* dengan hipotesis :

H0 = *Random Effect* Model lebih baik daripada *Fixed Effect* Model.

H1 = *Fixed Effect* Model lebih baik daripada *Random Effect* Model.

Hasil pengujian Hausman Test adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: APOOL
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	4	1.0000

* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.
** WARNING: robust standard errors may not be consistent with assumptions of Hausman test variance calculation.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
IPM?	-0.002399	0.058744	-0.000405	0.0000
PAD?	0.000000	0.000000	-0.000000	0.0000
UMK?	0.000000	-0.000002	-0.000000	0.0000
JP?	-0.000000	-0.000003	0.000000	0.0000

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: Y?
Method: Panel Least Squares
Date: 12/01/17 Time: 14:53
Sample: 2012 2016

Included observations: 5
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 25
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.224008	0.212114	5.770512	0.0000
IPM?	-0.002399	0.003586	-0.668860	0.5131
PAD?	4.85E-11	1.22E-11	3.956344	0.0011
UMK?	3.74E-09	1.07E-08	0.350276	0.7307
JP?	-2.88E-07	2.45E-07	-1.177730	0.2561

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.999983	Mean dependent var	0.852000
Adjusted R-squared	0.999974	S.D. dependent var	0.990349
S.E. of regression	0.005053	Akaike info criterion	-7.464035
Sum squared resid	0.000408	Schwarz criterion	-7.025240
Log likelihood	102.3004	Hannan-Quinn criter.	-7.342332
F-statistic	115246.1	Durbin-Watson stat	2.279221
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews 8

Berdasarkan hasil pengujian di atas diperoleh nilai *chi-square* statistic sebesar 0.000000. Dengan membandingkan nilai *chi-square* statistic tersebut dengan nilai *chi-square* kritis ($\alpha = 0{,}05$) yaitu 9,488, maka diketahui bahwa hasil pengujian menerima H0 karena nilai *chi-square* statistic lebih kecil daripada *chi-square* kritis. Sehingga dari kesimpulan tersebut maka pendekatan yang lebih baik digunakan ialah *Random Effect Model.*

4.5 Analisis Hasil Regresi

Dari kedua pengujian diatas yaitu Uji Chow dan Uji Hausman diperoleh hasil yaitu *Random Effect Model* merupakan model yang paling baik untuk dilakukan analisis.

Tabel 4.8

Estimasi Output Hasil Regresi *Random Effect Model*

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 12/01/17 Time: 14:52
Sample: 2012 2016
Included observations: 5
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 25
Swamy and Arora estimator of component variances
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.340652	1.791682	-0.190130	0.8511
IPM?	0.058744	0.020452	2.872319	0.0094
PAD?	4.62E-09	8.00E-10	5.775559	0.0000
UMK?	-1.97E-06	4.46E-07	-4.421286	0.0003
JP?	-3.11E-06	1.30E-07	-23.87633	0.0000
Random Effects (Cross)				
YOGYA—C	2.18E-08			
SLEMAN—C	-5.57E-09			
BANTUL—C	-7.16E-10			
K_PROGO—C	-3.20E-08			
G_KIDUL—C	1.64E-08			

Effects Specification	S.D.	Rho
Cross-section random	5.07E-07	0.0000
Idiosyncratic random	0.005053	1.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.794327	Mean dependent var	0.852000
Adjusted R-squared	0.753193	S.D. dependent var	0.990349
S.E. of regression	0.492003	Sum squared resid	4.841333
F-statistic	19.31045	Durbin-Watson stat	0.340095
Prob(F-statistic)	0.000001		

Unweighted Statistics

R-squared	0.794327	Mean dependent var	0.852000
Sum squared resid	4.841333	Durbin-Watson stat	0.340095

Sumber : Hasil Pengolahan Data Dengan Eviews 8

4.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu ukuran yang menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekat garis regresi yang telah diestimasi dengan data sesungguhnya. Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi *Fixed Effect Model* menghasilkan nilai R^2 sebesar 0.794327yang berarti bahwa sebanyak 79,43% variasi atau perubahan pada ketimpangan ekonomi antarkabupaten di Provinsi Yogyakarta dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen dalam model, sedangkan sisanya 20,57% dijelaskan oleh sebab lain di luar model yang digunakan dalam penelitian ini.

4.5.2 Uji F

Uji F dilakukan untuk membuktikan secara statistik bahwa keseluruhan koefisien regresi signifikan dalam menentukan nilai variabel terikat. Uji F merupakan pengujian terhadap variabel bebas (independen variabel) secara bersama-sama yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Jika F-statistik < F-kritis (tabel) berarti Ho gagal ditolak atau variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen, tetapi jika F-hitung > F-tabel berarti Ho ditolak atau variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi *Random Effect Model* menunjukkan nilai F-statistik sebesar 19.31045 dan nilai probabilitas (F-statistik) sebesar 0.000001. Dengan membandingkan nilai F-statistik tersebut dengan nilai F-tabel sebesar 2,87 (α=5%) maka diketahui bahwa F-statistik lebih besar dari F-tabel. Dengan nilai probabbilitas F-Statistik 0.000001 yang lebih kecil dari tingkat signifikan (5%) maka Ho ditolak dan Hi diterima. sehingga dapat disimpulkan bahwa semua *regressor* (variabel independen) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

4.5.3 Uji T

Pengujian ini digunakan untuk menguji koefisien regresi, termasuk juga intersep secara individu. Pengujian hipotesis melalui uji statistik t dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh individual masing-masing variabel bebas dalam model terhadap variabel dependennya. Selain menguji signifikansi dengan *probability (t-statistic)* dengan α=5%, juga dilakukan uji arah atas nilai koefisiennya.

Hasil pengujian regresi dalam penelitian ini menunjukkan empat variabel bebas dinilai signifikan dengan nilai signifikan kurang dari 0,05 yaitu IPM (0.0094), PAD (0.0000), UMK (0.0003), dan JP (0.0000). Secara umum persamaan model penelitian dapat ditulis sebagai berikut

Theil = -0.340652 + 0.058744 IPM + 0.00000000462PAD – 0.00000197UMK – 0.00000311 JP

Berdasarkan persamaan diatas diketahui bahwa nilai konstanta (intersep) sebesar -0.340652, menunjukkan tingkat ketimpangan secara umum adalah -0.340652 apabila nilai semua variabel independen adalah 0. Koefisien regresi IPM adalah 0.058744 mengindikasi bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara IPM dengan ketimpangan ekonomi artinya apabila terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 1 poin maka tingkat ketimpangan ekonomi akan meningkat 0.058744poin. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 0.00000000462 mengindikasi bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dengan ketimpangan ekonomi artinya apabila terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 poin maka tingkat ketimpangan ekonomi akan meningkat 0.00000000462poin. Koefisien regresi variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK) adalah -0.00000197 mengindikasi bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan antara UMK dengan ketimpangan ekonomi artinya apabila terjadi peningkatan UMK 1 poin maka tingkat ketimpangan ekonomi akan turun 0,00000197poin.Koefisien regresi variabel Jumlah Penduduk (JP) adalah -0.00000311 mengindikasi bahwa ada pengaruh negatif dan signifikan antara JP dengan ketimpangan ekonomi artinya apabila terjadi peningkatan JP 1 poin maka tingkat ketimpangan ekonomi akan turun 0,00000311poin.

4.6 Pengujian Hipotesis

Berikut akan diuraikan hasil pengujian atas keempat hipotesis yang sebelumnya telah dirumuskan.

4.6.1 IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomiantarkabupaten diProvinsi Yogyakarta

Hasil dari penelitian ini IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta dengan probabilitas 0.0094. Variabel IPM memiliki koefisien sebesar 0.058744. Artinya jika setiap menambahan 1 poinIPM maka terjadi peningkatan ketimpangan sebesar 0.058744 poin.

4.6.2 PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomiantarkabupaten di Provinsi Yogyakarta

Hasil dari penelitian ini PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta. Hasil pengujian regresi data panel dengan metode *Random Effect Model* menunjukkan probabilitas 0.0000 dan koefisien sebesar 0.00000000462artinya setiap ada penambahan pendapatan asli daerah 1 poin maka terjadi kenaikan ketimpangan ekonomi sebesar 0.00000000462 poin.

4.6.3UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomiantarkabupaten di Provinsi Yogyakarta

Hasil dari penelitian ini UMK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta.

Hasil pengujian regresi data panel dengan metode *Random Effect Model* menunjukkan probabilitas 0.0003 dan koefisien sebesar -0.00000197 artinya setiap ada penambahan upah minimum kabupaten sebesar 1 poin maka terjadi penurunan ketimpangan ekonomi sebesar 0.00000197 poin.

4.6.4JP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomiantarkabupaten di Provinsi Yogyakarta

Hasil dari penelitian ini JP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta. Hasil pengujian regresi data panel dengan metode *Random Effect Model* menunjukkan probabilitas 0.0000 dan koefisien sebesar -0.00000311 .Artinya setiap ada penambahan Jumlah penduduk sebesar 1 poin maka terjadi penurunan ketimpangan ekonomi sebesar 0.00000311poin.

4.6.5 Semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi *Random Effect Model* menunjukkan nilai F-statistik sebesar 19.31045 dan nilai probabilitas (F-statistik) sebesar 0.000001. Dengan membandingkan nilai F-statistik tersebut dengan nilai F-tabel sebesar 2,87 (α=5%) maka diketahui bahwa F-statistik > F-tabel sehingga disimpulkan bahwa semua *regressor* (variabel independen) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

4.7 Interpretasi Hasil Akhir

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Ini berarti angka variabel indeks pembangunan manusia di Provinsi Yogyakarta baik dan bisa menjamin bahwa dapat menurunkan angka ketimpangan ekonomi yang terjadi. IPM merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kenaikan nilai IPM kabupaten di Provinsi Yogyakarta dari tahun ke tahun dapat dijadikan jaminan bagi turunnya ketimpangan ekonomi di sana. Bahkan IPM di Sleman tergantung sangat tinggi yaitu mencapai 81,56 ditahun 2016 hal tersebut bisa dikatakan sangat baik karena sudah melebihi angka standard daerah maju yaitu diatas 80%. Hal tersebut terjadi karena sudahsadarnya masyarakat Jogja dalam menimba ilmu di dunia pendidikan baik dari jenjang dasar – menengah – menengah atas- dan perguruan tinggi. Kesadaran masyarakat tersebut didukung oleh majunya sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Yogyakarta mengingat Jogjakarta disebut juga sebagai kota pelajar. Sayangnya pembangunan sarana dan prasarana terutama pendidikan lebih condong ke kota Jogja dan Kabupaten Sleman. Tidak wajar jika pada tahun 2016 IPM Gunung Kidul hanya mencapai 68,20% sehingga sangat timpang jika dibandingkan dengan keempat daerah lainnya.

Tabel 4.9

Data IPM per Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

tahun 2012-2016 (persen)

Kabupaten	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
YOGYAKARTA	76.15	76.44	76.81	77.59	77.89
SLEMAN	80.10	80.26	80.73	81.20	81.56
BANTUL	76.13	76.78	77.11	77.99	78.30
KULON PROGO	69.74	70.14	70.68	71.52	71.78
GUNUNG KIDUL	65.69	66.31	67.03	67.41	68.20

Sumber: BPS 2016

Tabel diatas menunjukkan data IPM masing-masing kabupaten. Perbedaan antara Kabupaten Sleman sebagai pemilik IPM tertinggi dengan daerah lain sekitar 3 sampai 13%. Jika melihat tabel 4.10 tentang Pendapatan Asli Daerah, terlihat Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Kabupaten Gunung Kidul memiliki IPM terendah tetapi bukan memiliki Pendapatan Asli Daerah terendah. Kabupaten Kulon Progo yang memiliki nilai IPM di atas Kabupaten Gunung Kidul justru memiliki Pendatan Asli Daerah terendah. Kabupaten Sleman yang berjarah sekitar 3 sampai 13% nilai IPM dibandingkan daerah lainnya, memiliki Pendapatan Asli Daerah relatif jauh dibandingkan kabupaten lainnya terutama Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul. Hal tersebut disebabkan karena Kabupaten Sleman yang dimulai tahun 2015 lebih banyak melakukan pembangunan terutama pada infrastrukur, mall, hotel, dan apartemen dibandingkan kabupaten lainnya.

Tabel 4.10

Data PAD per Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

tahun 2012-2016 (ribu rupiah)

Kabupaten	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
YOGYAKARTA	241,190,745	304,797,499	404,272,608	449,849,108	507,875,473
SLEMAN	220,367,231	298,406,947	383,497,912	577,585,009	624,758,777
BANTUL	121,593,862	170,006,171	265,128,265	312,419,914	380,475,674
KULON PROGO	54,293,141	64,750,332	92,815,160	187,802,917	213,965,972
GUNUNG KIDUL	55,600,362	66,710,860	90,333,149	145,856,403	232,475,879

Sumber : BPS 2016

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomiantar kabupaten di Provinsi Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena besar pembayaran pajak tergantung dengan harta atau aset yang dimiliki oleh masing-masing individu. Jadi penduduk yang termasuk golongan kaya akan membayar pajak yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang masuk dalam golongan miskin. Kenaikan PAD dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi sehingga PAD yang digunakan sebagai sumber APBD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dapat menurunnkan ketimpangan ekonomiantar kabupaten di Provinsi Yogyakarta. PAD di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sangat mencolok dibandingkan dengan kabupaten lainnya, karena kedua daerah tersebut termasuk daerah kota di Provinsi Yogyakarta sehinnga besarnya PAD dikedua

kabupaten tersebut mayoritas di dapat dari pajak reklame, pajak hotel, restoran, retribusi dll. Disamping itu juga daerah-daerah di Sleman dan Kota Jogja sebagian besar digunakan untuk potensi wisata (desa wisata) sehingga pendapatan dari desa wisata juga mempengaruhi ketimpangan PAD di kedua kabupaten tersebut terhadap kabupaten lain.

Tabel 4.11

Data UMK per Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

tahun 2012-2016

Kabupaten	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
YOGYAKARTA	892.660	1.065.247	1.173.300	1.302.500	1.452.400
SLEMAN	850.340	1.026.181	1.127.000	1.200.000	1.338.000
BANTUL	754.450	993.484	1.125.500	1.163.800	1.297.700
KULON PROGO	710.567	954.339	1.069.000	1.138.000	1.268.870
GUNUNG KIDUL	650.450	947.114	988.500	1.108.249	1.237.700

Sumber: DPPKA kab DIY

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta yang berarti bahwa jika UMP naik maka akan menurunkan ketimpangan ekonomi. Di provinsi Yogyakarta perbedaan UMK antar kabupaten tidak terlalu mencolok dan Kota Jogja memilik UMK tertinggi dari kabupaten lainnya sehingga banyak masyarakat daerah pinggir seperti Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo yang lebih memilih bekerja di kota Yogyakarta dibandingkan daerah

asalnya. Sehingga jika UMK dinaikkan maka akan berpengaruh pada berkurangnya ketimpangan ekonomi di Provinsi Yogyakarata. Pengaruh variabel UMK terhadap ketimpangan ekonomi lebih baik dibandingkan dengan pengaruh variabel lainnya karena peningkatan UMK dapat menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi.

Tabel 4.12

Data Jumlah Penduduk per Kabupaten di Provinsi Yogyakarta

tahun 2012-2016

Kabupaten	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
YOGYAKARTA	397,594	402,679	407,667	412,704	417,805
SLEMAN	1,128,943	1,141,733	1,154,501	1,167,481	1,182,561
BANTUL	934,674	947,072	959,445	972,511	983,672
KULON PROGO	398,672	403,179	407,709	412,198	415,201
GUNUNG KIDUL	692,579	700,191	707,794	715,282	721,435

Sumber: BPS 2016

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta. Hal ini berarti semakin besarnya jumlah penduduk mampu menurunkan ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta. Yang dimaksud dari menurunkan ketimpangan yaitu semakin banyak jumlah penduduk menandakan semakin banyak penduduk Yogjakarta yang berpendidikan (seperti yang dijelaskan pada bagian IPM)

sehingga peluang bekerja untuk masyarakat Yogyakarta semakin tinggi mengakibatkan menurunnya ketimpangan ekonomi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pengujian mengenai hubungan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Jumlah Penduduk (JP) terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta,maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten yang terjadi di Provinsi Yogyakarta. Pengaruh variabel UMK terhadap ketimpangan ekonomi lebih baik dari variabel yang lain karena setiap kenaikan UMK dapat menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk (JP)berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta

5. Hasil pengujian dengan menggunakan model regresi *Random Effect Model* menunjukkan bahwa semua regressor (variabel independen) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen

5.2 Saran

Variabel IPM dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Yogyakarta. Hal ini tentunya harus diperhatikan pemerintah dengan baik terutama pada sektor pemerataan pembangunan. Karena selama ini pembangunan hanya terkonsentrasi pada daerah kota saja, sehingga daerah pinggir belum maksimal dalam melakukan pembangunan yang menyebabkan arus urbanisasi ke kota tinggi. Jika pembangunan merata maka akan meningkatkan IPM dan PAD pada daerah pinggir dan akan menurunkan ketimpangan antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Herwin, Mopangga (2011), "Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo". Jurnal Trikonomika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Vol. 10. No.1. Hal.40-51.

Nurhuda, Rama, 2013. "Analisis Ketimpangan Pembangunan studi di Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2013. Jurnal Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. Diunduh tanggal 26 Oktober 2014, dari administrasi publik.studentjournal.ub.ac.id

Noegroho dan Soelistianingsih (2007), "Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah dan faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional", Parallel Session IV A: Urban dan Regional Kampus UI Depok

Tiffani Ayu (2015), " Analisis Ketimpangan PDRB per kapita Antar Daerah Tahun 2014", Skripsi sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Musfidar, M. (2010), " Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi selatan tahun 2001-2012", Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan

Undulifolia, C. (2012), " Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Kudus tahun 2005-2009", Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Rachman, L, F. (2016), "Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Kecamatan di Kabupaten Grobokan tahun 2010-2014", Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Syafrizal (1997), "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat tahun 1997", Jurnal Prisma LP3ES, No 3.

Noviana, DN. (2014), " Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/kota di Provinsi DIY tahun 2003-2012", Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Semarang.

Retnosari, D. (2006), "Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat", Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Muhaimin, F. (2013), "Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2007-2011". Jurnal Fakultas Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Zahara, F. (2013), “Pertumbuhan dan Ketimpangan Ekonomi di DIY tahun 2006-2011”, Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Nugroho, P. (2014), “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Demak tahun 2008-2010.” Jurnal Universitas Brawijaya , Fakultas Ekonomi, Surabaya.

Sutarno Dan Kuncoro, M. (2004), “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di kabupaten Banyumas tahun 1993-2003.”, Jurnal Ekonomi Pembangunan AMP YKPN, Yogyakarta.

Rosyadi, I, M. (2014),” Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Provinsi di Pulau Sumatra”. Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Efendi, K (2013), “Analisis Pertumbuhan dan Ketimpangan antar Kabupaten di Provinsi Lampung”. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Lampung.

Syita, S. (2015), “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi DIY tahun 2008-2014”. Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Agustina, N. (2014), “Pengaruh Struktur Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2000-2013”. Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Setiawan, H. (2016), “Analisis Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015”. Skripsi Sarjana (Tidak Dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Putra, L. D. (2011), “Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2000-2007”, Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.

Aimon, Amar, dan Putri (2012), “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia”, Jurnal Kajian Ekonomi, dari ejournal.unp.ac.id.

Adipuryanti dan Sudibia (2015), “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Bali”, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Bali.

Saputro (2010), “Analisis Ketimpangan Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten/kota di Jawa Tengah”, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Jamzani (2010),”Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional di DIY dan Jawa Tengah”, Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta.

Pauzi, A (2013), “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Ketimpangan Distirbusi Pendapatan Provinsi Bali”, E-Jurnal EP Unud 5 (6):668-691, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Bali.

Mahesa, P, N, (2010), “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar”, E-jurnal EP Unud, 2 (3) : 119-128, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Bali.

Yuliana, T, (2014), “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten di Kalimantan Timur”, Journal Economics and Policy, Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur.

Bantika, V, (2013), “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Utara”, E-Journal.Unsrat.ac.id, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Ginting (2014), “Analisis Ketimpangan Pembangunan di Indonesia”, E-Jurnal Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi Sekretariat Jendran DPR RI.

Rosmeli (2013), “Dampak Belanja Daerah Terhadap Ketimpangan Antar Daerah di provinsi Jambi”, Jurnal Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi, Jambi.

Restiatun (2009), “Identifikasi Sektor Unggulan dan Ketimpangan Antar Kabupaten di Provinsi DIY”, Jurnal Ekonomi dan Study Pembangunan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Barika (2012), “Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/kota Di Provinsi Bengkulu tahun 2005-2009”, Jurnal Perencanaan Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Bengkulu, Bengkulu.

Efriza (2014), “Analisis Kesenjangan Pendapatan Antar Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur di Era *Desentralisasi Fiscal”,* Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 2 no 2, Universitas Brawijaya, Malang.

Wahyuni, P, (2014), “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/kota di Provinsi Bali”, E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayan, Bali.

Lampiran – Lampiran

Data Skripsi

KABUPATEN	TAHUN	Y	IPM	PAD	UMK	JP
KOTA YOGYA	2012	2.79	76.15	241190745	892660	397594
KOTA YOGYA	2013	2.78	76.44	304797499	1065247	402679
KOTA YOGYA	2014	2.79	76.81	404272608	1173300	407667
KOTA YOGYA	2015	2.79	77.59	449849108	1302500	4127104
KOTA YOGYA	2016	2.78	77.89	507875473	1452400	414805
SLEMAN	2012	0.45	80.10	220367231	850340	1128943
SLEMAN	2013	0.46	80.26	298406947	1026181	1141733
SLEMAN	2014	0.46	80.73	383497912	1127000	1154501
SLEMAN	2015	0.46	81.20	577585009	1200000	1167481
SLEMAN	2016	0.46	81.56	624758777	1338000	1182561
BANTUL	2012	0.25	76.13	121593862	754450	934674
BANTUL	2013	0.25	76.78	170006171	993484	947072
BANTUL	2014	0.25	77.11	265128265	1125500	959445
BANTUL	2015	0.25	77.99	312419914	1163800	972511
BANTUL	2016	0.24	78.30	380475674	1297700	983672
KULON PROGO	2012	0.45	69.74	54293141	710567	398672
KULON PROGO	2013	0.45	70.14	64750332	954339	403179
KULON PROGO	2014	0.45	70.68	92815160	1069000	407709
KULON PROGO	2015	0.45	71.52	187802917	1138000	412198
KULON PROGO	2016	0.46	71.78	213965972	1268870	415201
GUNUNG KIDUL	2012	0.32	65.69	55600362	650450	692579
GUNUNG KIDUL	2013	0.32	66.31	66710860	947114	700191
GUNUNG KIDUL	2014	0.31	67.03	90333149	988500	707794
GUNUNG KIDUL	2015	0.31	67.41	145856403	1108249	715282
GUNUNG KIDUL	2016	0.32	68.20	232475879	1237700	721435